

Ringkasan Kebijakan No. 19

Meningkatkan Inklusi dalam Indeks Literasi Digital Nasional: Dari Pengukuran hingga Pemberdayaan

oleh Natasya Zahra



Pesan Utama

- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menyusun indeks literasi digital untuk menilai kondisi literasi digital nasional, memetakan kompetensi digital penduduk Indonesia, dan mengembangkan kerangka kerja guna mengukur literasi digital di 34 provinsi di Indonesia. Indeks ini akan membantu Ditjen Aptika untuk menyediakan pelatihan literasi digital kepada 50 juta warga Indonesia pada 2024, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo tahun 2020-2024.
- Indeks literasi digital ini menggunakan instrumen penilaian diri (*self-assessment*) untuk mengukur kompetensi-kompetensi literasi digital utama, seperti pengetahuan dan kemampuan untuk mengoperasikan alat-alat digital. Namun, terdapat isu ketidakakuratan teknis dan operasional dalam metode penilaian ini. Akibatnya, Ditjen Aptika tidak dapat mengidentifikasi keterampilan-keterampilan spesifik yang kurang dikuasai warga Indonesia atau segmen masyarakat yang membutuhkan lebih banyak dukungan literasi digital. Persoalan ini menghambat pengembangan program pelatihan literasi digital yang efektif dan tertarget.
- Melihat keterbatasan metode penilaian diri (*self-assessment*), Ditjen Aptika perlu menggunakan penilaian berbasis kinerja untuk mengevaluasi kompetensi teknis dan operasional dalam *digital skill* dan pengetahuan terkait aspek literasi digital lainnya, seperti *digital safety*, *digital culture*, dan *digital ethics*. Penilaian berbasis kinerja dapat mengevaluasi hasil berbagai tugas yang disimulasikan dengan menggunakan perangkat lunak untuk menilai kemampuan mengoperasikan perangkat keras (komputer) dan perangkat lunak (contoh: peramban web, surat elektronik, pengaturan virus/privasi), serta pengetahuan terkait komponen literasi digital lainnya

(misalnya, *digital safety*). Ditjen Aptika perlu mempertimbangkan Penilaian Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) iSkills (iSkills Assessment for ICT Literacy) yang dikembangkan oleh Educational Testing Service (ETS) karena skenario-skenario yang dinilai sesuai dengan tugas-tugas yang ditetapkan sebagai indikator dalam pilar digital skills dalam indeks literasi digital.

- Untuk mengevaluasi kemampuan mengenali berita palsu secara akurat, Ditjen Aptika dapat membuat pengguna mengategorikan mana judul berita yang salah dalam sekumpulan judul acak. Hal ini akan membantu Ditjen Aptika meningkatkan reliabilitas penilaian dan mengurangi kemungkinan pengguna hanya menebak-nebak. Uji kemampuan membedakan (*discernment ability test*) yang dikembangkan oleh Benjamin A. Lyons dapat dijadikan acuan.
- Ditjen Aptika seyogianya menyediakan opsi penilaian berbasis kertas (*paper-based*) untuk mengevaluasi *digital skill* maupun kemampuan mengidentifikasi berita palsu sebagai solusi keterbatasan akses perangkat keras dan internet di sejumlah daerah di Indonesia. Ditjen Aptika dapat mengacu kepada Uji Literasi Teknologi dan Informasi (Test of Technological and Information Literacy atau TILT) yang menguji tujuh komponen literasi TIK yang tercakup dalam iSkills Assessment ETS untuk mengembangkan penilaian berbasis kertas ini.
- Evaluasi keterampilan lunak (*soft skills*), seperti *digital culture* dan *digital ethics*, cocok dengan penilaian penilaian diri. Teknik kualitas data, seperti teknik klaim berlebihan (*overclaiming*), perlu diterapkan untuk memperbaiki metodologi penilaian mandiri yang digunakan oleh Ditjen Aptika.
- Ditjen Aptika perlu mengembangkan analisis diferensial untuk kelompok masyarakat perdesaan dan anak-anak usia sekolah yang mengidentifikasi berbagai tantangan, keterampilan, dan kapasitas unik setiap target demografi tersebut. Informasi ini akan menjadi dasar pengembangan program-program pelatihan dan dukungan literasi digital tertarget untuk memenuhi kebutuhan literasi digital segmen-segmen masyarakat yang beragam dan rentan.
- Ditjen Aptika dapat memanfaatkan wawasan dari indeks dengan menggunakan data indeks untuk menilai kinerja tahunan pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi digital. Dari penilaian kinerja inilah jumlah anggaran untuk daerah dapat dialokasikan. Kebijakan ini akan mendorong pengembangan inisiatif dan strategi literasi digital yang inovatif dan tertarget serta memotivasi para pemangku kepentingan untuk mempertahankan kinerja yang baik pada indeks.

Gambaran Umum Indeks Literasi Digital

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menekankan pentingnya peran literasi digital masyarakat Indonesia dalam mendorong transformasi digital negeri ini (Kemenkominfo, 2021a). Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo 2020–2024, Kemenkominfo menetapkan literasi digital sebagai program prioritas dan melimpahkan mandat kepada Ditjen Aptika untuk menyediakan program literasi digital kepada 50 warga Indonesia pada 2024 (Kemenkominfo, 2021b; Ditjen Aptika, 2021). Demi mencapai tujuan ini, Ditjen Aptika menyusun indeks literasi digital pada 2020 untuk menilai kondisi literasi digital nasional, memetakan kompetensi digital penduduk Indonesia, serta mengembangkan kerangka kerja untuk mengukur literasi digital di 34 provinsi di Indonesia (Kemenkominfo & Katadata Insight Center, 2020). Sebuah survei yang dilakukan secara nasional dilaksanakan pada Agustus 2020 untuk memenuhi upaya ini dan mengonversikan temuan-temuannya menjadi skor indeks 2020. Survei ini dilakukan kembali pada 2021 dan 2022 untuk memantau perkembangan literasi digital dari tahun ke tahun.

Indeks literasi digital menasar penduduk Indonesia pengguna internet berusia 13 hingga 70 tahun. Indeks tahun 2021 dan 2022 memiliki ketentuan yang lebih spesifik, yakni bahwa responden harus mengakses internet dalam tiga bulan terakhir untuk berpartisipasi dalam survei. Setiap tahun, hasil survei menunjukkan profil responden yang serupa: mayoritas adalah penduduk dewasa berusia antara 18 dan 70 tahun dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang. Survei tahun 2020 dan 2021 memperlihatkan proporsi yang hampir seimbang juga antara responden perkotaan dan perdesaan. Hal ini tidak tampak pada survei 2022 yang memiliki bagian analisis tersendiri untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi tidak memberikan informasi mengenai persentase responden perkotaan dan perdesaan yang disurvei.¹

Indeks literasi digital menggunakan metode pengambilan sampel acak multistage (*multistage random sampling*) untuk memilih responden dari setiap rumah tangga, dengan proporsi responden per provinsi ditentukan menggunakan sistem Klasifikasi Perdesaan dan Perkotaan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei dilaksanakan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner yang mengukur empat pilar literasi digital: digital ethics (*netiquette*, tata krama di ruang digital), digital safety (perlindungan data dan keamanan internet), digital skill (kompetensi digital), dan digital culture (kewarganegaraan di internet) menggunakan skala 1 hingga 5 (lihat catatan kaki untuk penjelasan).² Indikator pengukuran pilar didasarkan pada Kerangka Referensi Global Keterampilan Literasi Digital (*A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills*) dari UNESCO, dan indeks 2022 juga memadukannya dengan Paket Informasi Pengukuran Keterampilan Digital dan Literasi Digital G20 (*G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy: Framework and Approach*).³

Meski telah mengalami berbagai perubahan dalam hal cakupan, metodologi, dan kerangka kerja dalam tiga tahun pertamanya (lihat Lampiran A), indeks literasi digital masih bertujuan utama menangkap kondisi literasi digital masyarakat Indonesia sesuai dengan mandat Ditjen Aptika (Wawancara dengan Koordinator Program Literasi Digital Nasional, 2023).

¹ Wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) terdiri atas 62 kabupaten yang diidentifikasi sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dibandingkan dengan rata-rata nasional. Indeks 2022 mencakup kesemua 62 kabupaten dalam bagian analisisnya untuk wilayah 3T.

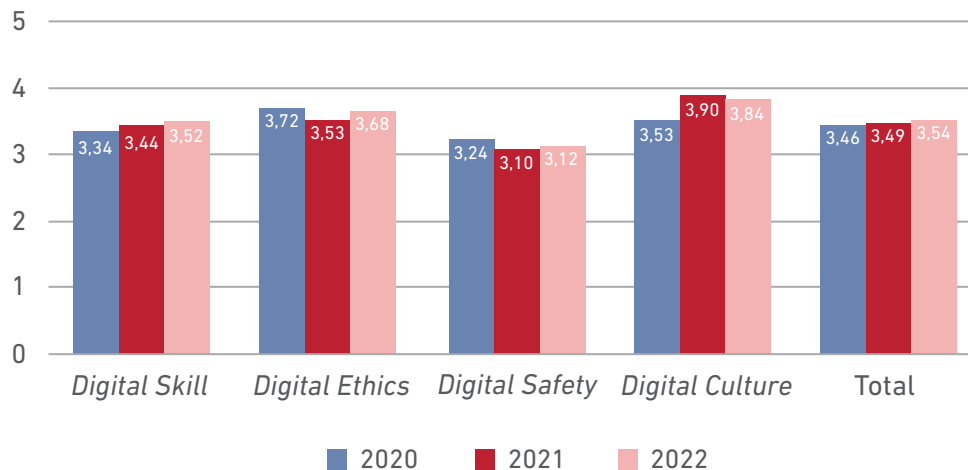
² Keterampilan digital mengacu kepada kompetensi terkait kesadaran, keterbiasaan, dan kemampuan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem informasi digital. Etika digital ditentukan berdasarkan kesadaran dan kemampuan seseorang dalam menerapkan netiket dalam kehidupan sehari-harinya. Keamanan digital mengacu kepada kemampuan pengguna mengenali, menganalisis, dan mempertimbangkan berbagai komponen keamanan digital serta kesadaran akan perlindungan data pribadi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya digital mengacu kepada kemampuan seseorang dalam membaca, mengenali, dan mengembangkan pemahaman nilai-nilai nasional yang terdapat pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam aktivitas digitalnya dan berkontribusi terhadap digitalisasi budaya melalui penggunaan TIK.

³ *Toolkit G20* ditambahkan untuk memperkuat pilar keterampilan digital dengan memasukkan aspek-aspek pemberdayaan (kemampuan menggunakan keuangan digital dan lokapasas), sedangkan indikator Literasi terkait komunikasi dan berpikir kritis, perilaku dan kebiasaan alat-alat digital, dan keamanan (perlindungan data pribadi) ditambahkan untuk melengkapi indikator budaya digital, keamanan digital, dan keterampilan digital.

Mengkaji dan Menginterpretasikan Skor-Skor Indeks Saat Ini – Menjelaskan Kondisi Literasi Digital di Indonesia

Jika membandingkan skor literasi digital dari ketiga survei, skor literasi digital secara keseluruhan meningkat sedikit demi sedikit setiap tahunnya, dengan fluktuasi pada masing-masing pilar. Menurut Ditjen Aptika, skor indeks 2022 sebesar 3,54 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki literasi digital tingkat sedang, dengan skor 4,0 menunjukkan literasi digital tingkat baik (Kemenkominfo & Katadata Insight Center, 2020; Ditjen Aptika, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi digital secara berangsur mengalami kemajuan (Gambar 1). Namun, jika dilihat dari masing-masing pilar, masyarakat Indonesia tampak masih mengalami kesulitan dalam memenuhi indikator-indikator utama literasi digital.

Gambar 1.
Skor Indeks Literasi Digital Tahunan, Dipilah Berdasarkan Tahun dan Pilar

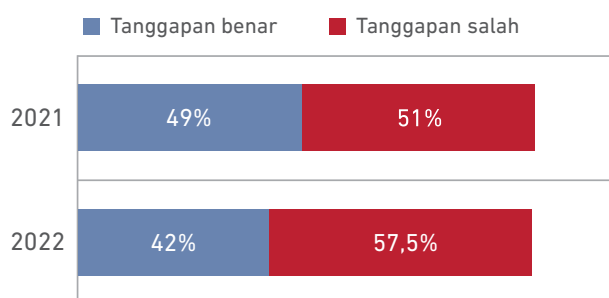


Meski skor digital skill meningkat, tanggapan-tanggapan dalam survei memperlihatkan bahwa responden belum menguasai kompetensi-kompetensi utama dengan baik, seperti pengoperasian teknis dan pengetahuan terkait perangkat keras dan lunak. Hal ini dibuktikan oleh menurunnya skor penilaian ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 (Gambar 2).⁴

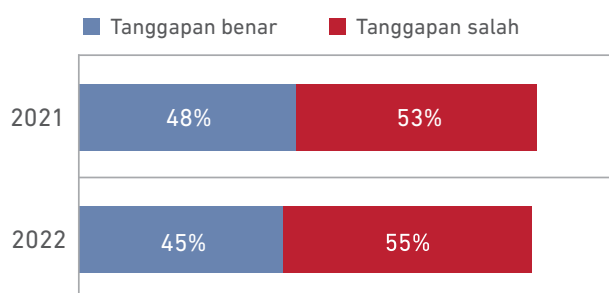
⁴ Total persentase jawaban benar dan tidak benar pada Pengetahuan tentang Perangkat Lunak untuk tahun 2021 adalah 101%. Meski secara statistik ini kurang tepat, data inilah yang tercantum pada laporan yang dipublikasikan oleh Kemenkominfo dan Katadata pada 2022 (Kemenkominfo & Katadata Insight Center, 2023).

Gambar 2.
Penilaian atas Pengetahuan Responden Terkait Alat-Alat Digital (Indeks 2022)

Pengetahuan tentang Perangkat Keras



Pengetahuan tentang Perangkat Lunak

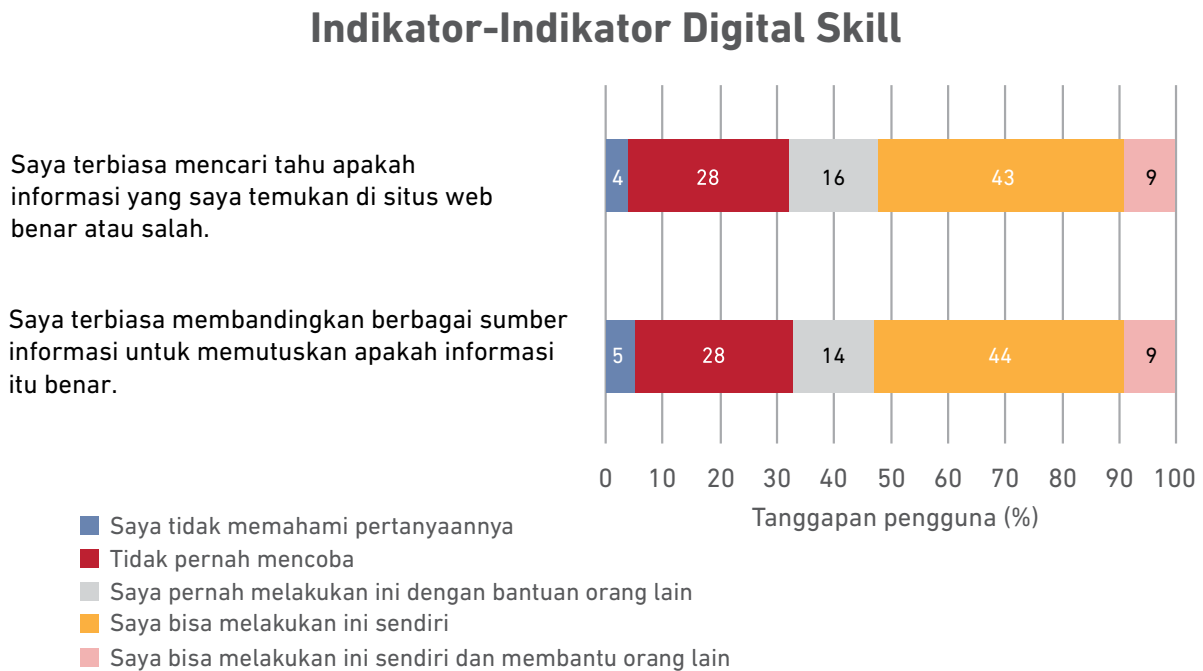


Penilaian indeks atas digital skill juga menemukan bahwa praktik-praktik yang seharusnya dilakukan dalam menerima informasi dan data digital, seperti pengecekan fakta dan evaluasi sumber berita/informasi belum banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Secara spesifik, 28% responden belum pernah memeriksa fakta dari informasi yang mereka peroleh secara daring, dan 16% membutuhkan bantuan untuk melakukan hal tersebut, sementara 28% belum pernah membandingkan berbagai sumber informasi untuk menentukan kebenaran informasi yang mereka terima, dan 14% membutuhkan bantuan untuk melakukan hal tersebut (Gambar 3). Hasil-hasil ini menyoroti adanya potensi kerentanan masyarakat Indonesia terhadap misinformasi, terutama mengingat banyaknya risiko yang ada dalam lanskap digital Indonesia. Pada 2017 saja, Kemenkominfo mengidentifikasi 800.000 situs aktif di Indonesia yang menyebarkan informasi keliru serta hoaks. Fakta ini menggarisbawahi risiko besar misinformasi pada masyarakat Indonesia (Kemenkominfo, 2017).

Hal ini patut dijadikan perhatian seiring dengan meningkatnya permintaan akan keterampilan digital (digital skill) pada tenaga kerja Indonesia untuk memanfaatkan berbagai platform dan instrumen ekonomi digital secara efektif serta menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kemenkominfo, 2022; Negara & Meilasari-Sugiana, 2022; SMERU Research Institute, 2022; Tinmaz *et al.* 2022). Demi mempersiapkan digitalisasi sektor manufaktur Indonesia secara lebih lanjut, Kemenkominfo memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta lebih banyak "talenta digital"⁵ (pekerja dengan literasi digital yang memadai) pada 2030 dan harus mencetak 600 ribu talenta digital per tahunnya melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan (Kemenkominfo, 2020). Akan tetapi, sebuah analisis dari The SMERU Research Institute berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menemukan bahwa kurang dari 1% tenaga kerja Indonesia menguasai keterampilan digital tingkat lanjut, sementara 50% hanya memiliki keterampilan tingkat dasar hingga menengah (BPS, sebagaimana dikutip dalam The SMERU Research Institute, 2022). Tingkat literasi digital yang rendah memperburuk kurangnya jumlah pekerja yang memiliki literasi serta kompetensi digital yang baik sehingga menghambat keberlanjutan pembangunan ekonomi digital Indonesia (Center for Strategic and International Studies [CSIS] Indonesia, 2022; Sapulette & Muchtar, 2023; SMERU Research Institute, 2022).

⁵Berdasarkan program Digital Talent Scholarship (n.d.) dibawah naungan Kemenkominfo, digital talent adalah pekerja yang memiliki pemahaman serta kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital dan memiliki keahlian di bidang TIK untuk turut mendukung transformasi digital Indonesia serta transisi ekonomi digital ke industri 4.0 (Lihat Kemenkominfo, 2019 untuk pembahasan terkait Industri 4.0).

Gambar 3.
Indikator-Indikator Digital Skill di Bawah Skor Nasional (Indeks 2022)⁶



Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia berada di peringkat tiga terbawah dalam hal keamanan dan kepercayaan internet, dan menempati peringkat ke-83 dari 100 negara dalam hal tingkat kepercayaan terhadap informasi dari media sosial—menunjukkan adanya kekhawatiran terkait keamanan digital (The Economist, 2022). Lebih dari setengah indikator dalam digital safety memiliki skor di bawah 3, lebih rendah jika dibandingkan dengan skor indeks digital safety nasional, yakni 3,12.⁷ Menurut kategorisasi dari Katadata, skor-skor digital safety ini menunjukkan literasi digital yang termasuk dalam kategori buruk (Kemenkominfo & Katadata Insight Center, 2020). Hampir 50% responden kurang memiliki kesadaran seputar praktik-praktik keamanan digital dasar, seperti perlindungan dari virus (Gambar 3 & Gambar 4). Kurangnya kesadaran dan adopsi praktik-praktik keamanan digital dasar pada responden survei menyiratkan bahwa masyarakat Indonesia rentan terhadap berbagai risiko yang ada pada ruang digital, seperti perangkat lunak berbahaya (*malware*) dan kejahatan siber.⁸

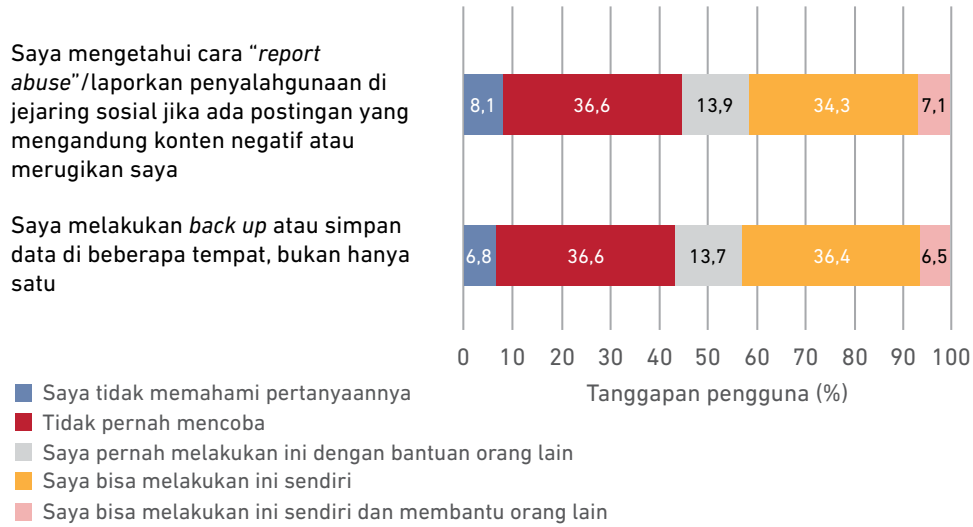
⁶ Indikator-indikator digital skill yang memiliki skor di atas skor indeks digital skill nasional, yakni 3,52, adalah kemampuan mengunduh fail/aplikasi, kemampuan menghubungkan alat-alat digital ke internet, kemampuan mengunggah fail, dan kemampuan mencari dan mengakses data, informasi, dan konten media digital. Indikator lainnya yang memiliki skor di bawah skor nasional adalah kemampuan berinteraksi menggunakan berbagai teknologi komunikasi digital dan keterbiasaan menggunakan platform niaga-el (*e-commerce*). Dua indikator pada Gambar 3 dimasukkan untuk memberikan gambaran bagaimana indikator-indikator digital skill yang memiliki skor rendah berhubungan dengan praktik-praktik keamanan digital dasar dan literasi informasi.

⁷ Indikator-indikator digital safety yang disebutkan dalam Gambar 3 dan Gambar 4 (urut, dari atas ke bawah) memiliki skor 2,99, 2,96, 2,91, dan 2,66 secara berturut-turut—semua lebih rendah daripada skor indeks digital safety secara keseluruhan, yakni 3,12.

⁸ Dibahas lebih lanjut dalam topik literasi digital pada masyarakat perdesaan.

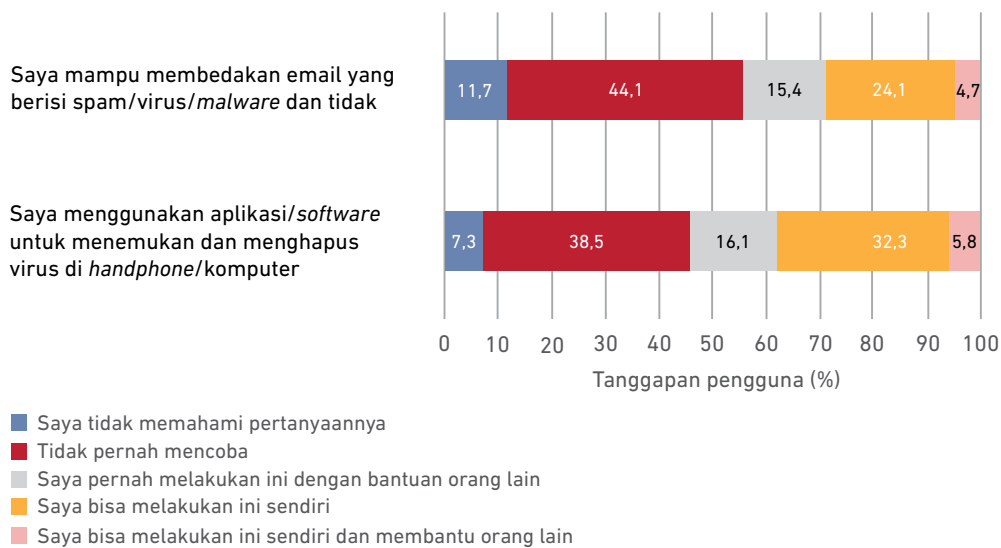
Gambar 4.
Indikator-Indikator Keamanan Digital di Bawah Skor Nasional (Indeks 2022)⁹

Indikator-Indikator Digital Safety



Gambar 5.
Indikator-Indikator Digital Safety di Bawah Skor Nasional (Indeks 2022) (lanjutan)

Indikator-Indikator Digital Safety



⁹ Indikator-indikator digital safety yang memiliki skor di atas skor indeks keamanan digital nasional, yakni 3,12, adalah kemampuan menonaktifkan pilihan geolokasi pada alat-alat digital, kemampuan mengontrol siapa yang melihat unggahan media sosial, dan penggunaan gabungan angka, huruf, dan karakter khusus atau tanda baca. Indikator-indikator dengan skor di bawah skor indeks nasional tertera pada Gambar 4 dan 5.

Representasi Kelompok-Kelompok Rentan – Implikasi untuk Program-Program Literasi Digital Ditjen Aptika

Indeks literasi digital telah memperlihatkan kemajuan maupun tantangan dalam pengembangan literasi digital di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk memperbaiki literasi digital harus terus dilanjutkan.

Ditjen Aptika bertujuan memperluas jangkauan program-program literasi digitalnya, dan indeks literasi digital ini akan digunakan untuk mengevaluasi keefektifan program serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam mewujudkan literasi digital di seluruh Indonesia untuk pengembangan program di masa mendatang (Kemenkominfo & Katadata Insight Center, 2021; Wawancara dengan Koordinator Program Literasi Digital Nasional, 2023).

Namun, analisis dalam indeks ini tidak cukup membedakan segmen-segmen masyarakat, bahkan mereka yang telah diidentifikasi membutuhkan lebih banyak dukungan literasi digital.

Anak-anak merupakan kelompok paling rentan dalam ruang digital Indonesia yang berisiko terpapar konten negatif, membuat mereka menjadi target demografi yang penting (Wendratama *et al.*, 2021). Akan tetapi, metodologi indeks menggabungkan anak-anak usia sekolah, mahasiswa, guru, dan pengajar pendidikan tinggi ke dalam kelompok “sektor pendidikan” dengan satu skor indeks literasi digital.¹⁰ Kurangnya diferensiasi responden dalam analisis indeks mengabaikan berbagai kebutuhan dan kemampuan kognitif yang bersifat spesifik yang membedakan literasi digital anak-anak dari orang dewasa (Soon *et al.*, 2022). Alhasil, indeks ini tidak dapat menilai kompetensi digital anak-anak secara menyeluruh.

Masyarakat perdesaan Indonesia juga telah diidentifikasi membutuhkan perhatian lebih, tetapi indeks literasi digital hanya membandingkan skor literasi digital untuk wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur, serta skor literasi digital setiap provinsi. Tidak ada perbedaan skor yang signifikan menurut perbandingan ini sehingga penilaian berdasarkan skor saja tidak dapat memberikan wawasan yang spesifik terkait tantangan, kebutuhan, dan kinerja masyarakat perdesaan dalam hal literasi digital. Indeks terkini tidak menguraikan secara spesifik persentase responden survei perkotaan dan perdesaan, sementara kinerja responden pada pilar literasi digital individu juga tidak membedakan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.

Dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, masyarakat perdesaan memiliki tingkat konektivitas digital yang lebih rendah. Mereka membentuk 58% masyarakat Indonesia yang hidup tanpa akses internet (UNICEF, 2021), meski jumlahnya hanya 43% dari keseluruhan populasi (BPS, 2022; Bank Dunia, 2021). Studi-studi kasus pada sekolah di perdesaan dan pada tingkat desa di Indonesia menggarisbawahi kurangnya akses terhadap perangkat keras dasar (contoh: komputer, ponsel cerdas) serta keterampilan digital dan keterbiasaan menggunakan teknologi digital. Kelemahan-kelemahan ini menjadi penghalang bagi masyarakat perdesaan untuk menerima manfaat transformasi digital (UNICEF, 2021; Nababan & Imron, 2022; Onitsuka *et al.*, 2018; Zulvia & Harahap, 2022). Secara keseluruhan, kurangnya akses terhadap perangkat digital dan konektivitas, serta rendahnya tingkat keterampilan digital, memperlebar kesenjangan literasi digital di daerah-daerah perdesaan Indonesia (Jayanthi & Dinaseviani, 2022).

¹⁰ Siswa dan guru diberi pertanyaan survei yang berbeda dan memberi tanggapan tingkat kepuasan dengan adopsi teknologi yang sangat berbeda. Siswa hanya ditanyai tentang tingkat kenyamanan menggunakan alat-alat digital di sekolah dan tidak ditanyai tentang tingkat kompetensi mereka dalam menggunakan alat-alat tersebut secara keseluruhan (Kemenkominfo & Katadata, 2023, hlm. 46–9).



Di samping itu, masyarakat perdesaan juga dihadapkan dengan masalah-masalah keamanan digital, seperti kejahatan siber, penipuan, dan hoaks. Upaya-upaya untuk memerangi dampak-dampak negatif penggunaan internet pun telah dikerahkan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi [Kemendes PDTT], 2021; Nababan & Imron, 2022; Rosyidah & Warisaji, 2022). Kemendes PDTT juga mengutarakan kekhawatiran terkait kurangnya keterampilan literasi digital dan informasi seputar literasi digital pada tingkat desa. Hal ini menghalangi proses digitalisasi dan adopsi teknologi oleh para kepala desa (acara oleh Katadata Insight Center & Kemenkominfo, 2023). Bank Dunia (2021) melaporkan bahwa hanya sekitar 10% dari 74.957 desa di Indonesia telah terdaftar dalam Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa) dari Kemendes PDTT. Rendahnya persentase ini menunjukkan urgensi pengembangan literasi digital guna mendukung digitalisasi di daerah perdesaan.

Kriteria partisipan survei indeks 2021 dan 2022 mengecualikan orang-orang yang tidak mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Pengecualian ini dapat menghalangi penilaian yang komprehensif atas literasi digital serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat perdesaan dan terpencil di Indonesia.

Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengemukakan pendapat yang serupa terhadap indikator “akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)” yang dikembangkan untuk *G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy* dan menyatakan bahwa indikator ini tidak cukup menangkap kesenjangan digital antardaerah yang ada. Rumah tangga perkotaan dua kali lebih banyak mengakses alat-alat digital dan internet daripada rumah tangga perdesaan (CSIS Indonesia, 2022). Bank Dunia pun menyoroti tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat perdesaan Indonesia. Keterampilan digital yang buruk serta hambatan akses internet dan perangkat keras membatasi perluasan layanan logistik elektronik, adopsi pembayaran uang digital, dan pengembangan dan penyelenggaraan layanan-layanan krusial, termasuk inisiatif-inisiatif digitalisasi pemerintahan, teknologi pendidikan (*edtech*), dan teknologi kesehatan (*healthtech*) di luar daerah-daerah perkotaan di Indonesia (Bank Dunia, 2021).

Indeks literasi digital meliputi analisis khusus untuk wilayah-wilayah 3T yang menguraikan kompetensi dan kinerja dalam aspek-aspek literasi digital, tetapi analisis ini hanya dilakukan pada 62 kabupaten yang diidentifikasi sebagai kabupaten 3T. Analisis yang dilakukan hanya pada wilayah-wilayah 3T mengabaikan masyarakat perdesaan di daerah lainnya. Jumlah populasi perdesaan di Indonesia cukup besar, yaitu 43% dari keseluruhan jumlah penduduk (BPS, 2022; Bank Dunia, 2021).

Sebuah langkah harus diambil untuk membedakan masyarakat perdesaan dalam penilaian indeks, yakni guna meningkatkan kapasitas program-program pelatihan literasi digital tertarget dan memperluas relevansi indeks. Literasi digital dan digitalisasi harus didukung pada tingkat desa demi mendorong pembangunan ekonomi perdesaan serta resiliensi masyarakat lokal (Cao *et al.*, 2022). Digitalisasi tata kelola pemerintahan desa juga akan mengefektifkan dan memperluas penyaluran berbagai barang dan jasa publik utama yang bersifat vital (contoh: layanan kesehatan, pendidikan) (*ibid*).

Menggunakan Data Indeks: Langkah-Langkah untuk Mencapai Dampak Jangka Panjang

Bagian sebelumnya menelaah bagaimana indeks literasi digital menggabungkan analisis hasil dan skor indeks berbagai segmen masyarakat yang mengabaikan kebutuhan dan konteks spesifik literasi digital anak-anak dan masyarakat perdesaan. Supaya dapat secara efektif mengembangkan, menyediakan, serta mengelola pelatihan keterampilan digital, pemerintah membutuhkan data yang akurat dan representatif terkait kondisi literasi digital.

Metodologi yang lebih baik diperlukan untuk memperoleh informasi ini dengan mengukur secara menyeluruh sebesar apa kesenjangan keterampilan pada masyarakat serta mengidentifikasi letaknya (Chetty *et al.*, 2018). Hal ini akan memungkinkan Ditjen Aptika memenuhi komitmennya untuk mengembangkan program-program literasi digital berbasis bukti (Wawancara dengan Koordinator Program Literasi Digital Nasional, 2023).

Guna menciptakan dampak yang lebih besar dan jangka panjang, Ditjen Aptika harus mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mengintegrasikan temuan-temuan yang dihasilkan oleh metodologi indeks literasi digital yang telah diperbaiki ke dalam program-program pelatihannya.

Dua inisiatif literasi digital Kemenkominfo, SiBerkreasi (Gerakan Nasional Literasi Digital)¹¹ dan Program Literasi Digital menasar segmen masyarakat yang luas dari semua sektor, seperti pendidikan, pertanian, perikanan, desa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program-program tersebut dijalankan menggunakan berbagai format pada platform luring maupun daring, termasuk seminar, pembimbingan singkat, lokakarya, dan pemutaran film (Wawancara dengan Koordinator Program Literasi Digital Nasional, 2023; Ditjen Aptika, 2022).

Penargetan program dukungan literasi digital Indonesia yang luas telah banyak dikritik sebelumnya. Para pakar literasi digital merekomendasikan pendekatan yang lebih tertarget untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan tercakup dalam upaya literasi digital (Wendratama *et al.*, 2021). Misalnya, penelitian tentang program intervensi literasi digital menemukan bahwa kelompok lanjut usia (lansia)—yang kurang memahami ruang digital dan mungkin mengalami penurunan kognitif—lebih cocok dengan pembelajaran mandiri, sementara kelompok remaja lebih menyukai bentuk pelatihan yang lebih mutakhir, praktis, serta interaktif untuk menjelajahi lanskap digital yang kian menjadi kompleks (Soon *et al.*, 2022; UNICEF, 2021).

Di samping itu, metodologi penilaian yang digunakan oleh indeks literasi digital harus diperbaiki untuk mengukur kompetensi digital masyarakat Indonesia secara akurat. Ketiga survei menggunakan pertanyaan-pertanyaan penilaian diri (*self-assessment*) (Katadata & Kemenkominfo, 2023, hlm.11–2). Pendekatan ini lebih hemat biaya dan mudah untuk diterapkan, tetapi dibatasi oleh kebergantungannya pada evaluasi subjektif individu atas kompetensi diri yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan mereka (CSIS Indonesia, 2022; UNESCO, 2019).

Dengan memperbaiki metodologi indeks untuk mengukur keterampilan digital dan kemampuan mengenali hoaks, Ditjen Aptika bisa mengidentifikasi secara lebih akurat keterampilan apa saja yang masih belum dikuasai responden dengan baik, skenario atau masalah apa yang sulit mereka atasi, segmen masyarakat mana yang membutuhkan lebih banyak dukungan literasi digital, dan alat digital apa yang dirasa paling sulit dioperasikan oleh responden.

¹¹ SiBerkreasi (Gerakan Nasional Literasi Digital) muncul pada 2019 sebagai gerakan nasional untuk memerangi penyebaran konten negatif di internet melalui hoaks, perundungan siber, dan radikalisme daring. Gerakan ini mengadvokasikan pengintegrasian literasi digital ke dalam kurikulum formal dan mengembangkan berbagai modul pelatihan tentang literasi digital (Kemenkominfo, 2019).

Penghimpunan data tambahan dari hasil survei yang lebih terpilah dari anak-anak usia sekolah dan masyarakat perdesaan juga membantu Ditjen Aptika mengidentifikasi berbagai tantangan spesifik di sekolah dan desa untuk mendorong upaya literasi digital pada dua latar tersebut. Temuan-temuan ini kemudian dapat digunakan untuk menentukan alat dan metode pengajaran literasi digital yang paling efektif untuk meningkatkan literasi digital pada segmen masyarakat yang berbeda-beda. Pembuat kebijakan dan pelatih digital pun bisa mengembangkan program pelatihan untuk menutup kesenjangan keterampilan digital dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pasar tenaga kerja supaya kelompok-kelompok ini dapat memenuhi permintaan ekonomi digital yang kian berkembang (Chetty *et al.*, 2018).

Ditjen Aptika menyadari bahwa dibutuhkan kerja sama untuk memperluas dampak program literasi digital nasional (Wawancara dengan Koordinator Program Literasi Digital Nasional, 2023; Kemenkominfo, 2023). Dengan membedakan penilaian literasi digital berdasarkan beragam kelompok penduduk, kementerian dan aktor-aktor literasi digital lainnya bisa menyusun program-program yang lebih terfokus sehingga memperluas kerja sama antara Ditjen Aptika dan para pemangku kepentingan.

Misalnya, Ditjen Aptika dapat membantu Kementerian, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam memperkuat program-program pelatihan literasi digital yang ada dengan mengintegrasikan temuan terkait kondisi literasi digital yang berdampak terhadap sektor pendidikan (misalnya, anak-anak usia sekolah, mahasiswa, guru, dosen) ke dalam rencana programnya. Integrasi ini akan memungkinkan Kemendikbudristek untuk menargetkan dukungan digitalisasi sekolah dan mendorong literasi digital anak-anak pada berbagai tingkat pendidikan, baik di sektor pendidikan formal maupun informal. Ditjen Aptika juga dapat terbantu dalam mengembangkan program-program literasi digital yang lebih tertarget pada tingkat desa dengan Kemendes PDTT.

Selain itu, indeks literasi digital dapat menciptakan dampak jangka panjang jika digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah secara tahunan dalam mengupayakan literasi digital, yakni untuk menentukan anggaran bagi mereka. Kebijakan ini akan menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan literasi digital agar tetap bekerja di atas standar tertentu dalam indeks.

Memperbaiki Indeks: Mengkaji Ulang Metodologi Penilaian Diri

Identifikasi Masalah

Studi-studi terkait uji keterampilan TIK dan survei keterampilan internet menemukan bahwa penilaian diri (*self-assessment*) tidak secara akurat mencerminkan perbedaan kinerja dan cenderung mengestimasi keterampilan lebih atau kurang dari yang sebenarnya (Palczyńska & Rynko, 2020; van Deursen, van Dijk, & Peters, 2012). Penilaian diri mengandalkan norma dan kepercayaan pribadi responden tentang apa yang dianggap memuaskan, serta tingkat kepercayaan diri dan pemahaman tentang diri mereka sendiri. Hal ini dapat berujung pada evaluasi keterampilan dan pengetahuan diri sendiri yang kurang akurat (Aesart *et al.*, 2017; Helsper *et al.*, 2020; Herde *et al.*, 2019).¹² Penelitian tentang penilaian diri (*self-assessment*) menunjukkan bahwa kurang lebih 30% responden melihat kinerja dirinya secara berlebihan, sementara 10–15% cenderung menilainya kurang dari yang sebenarnya (Muszyński *et al.*, 2022; Robins & Beer, 2001). Responden laki-laki lebih banyak menilai keterampilan TIK dan internet mereka secara berlebihan daripada perempuan (Hargittai & Shafer, 2006; Palczyńska & Rynko, 2020; van Deursen, van Dijk, & Peters, 2011).

¹² Responden dalam survei penilaian diri rentan terhadap bias daya tarik sosial (*social desirability*), yaitu ketika seseorang enggan mengakui bahwa mereka tidak pandai melakukan sesuatu (Helsper *et al.*, 2020).

Potensi-potensi bias ini tampak pada indeks literasi digital 2022. Perwakilan Kemenkominfo dan mitra penelitiannya, Katadata Insight Center, khawatir bahwa responden yang menilai kompetensi dirinya kurang dari yang sebenarnya berkontribusi terhadap penurunan skor indeks (terutama pada digital culture) (acara dengan Katadata Insight Center & Kemenkominfo, 2023). Mereka berpendapat bahwa penilaian diri yang akurat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan digital culture membutuhkan kapasitas keterampilan berpikir kritis yang mungkin tidak dimiliki semua responden (*ibid*). Selain itu, responden laki-laki dalam indeks literasi digital 2023 memiliki skor yang lebih tinggi daripada perempuan di semua pilar literasi digital kecuali untuk digital culture. Karena kecenderungan laki-laki untuk menilai diri secara berlebihan dalam penilaian mandiri telah banyak terbukti pada penilaian keterampilan TIK dan internet, temuan-temuan ini menunjukkan urgensi untuk mengevaluasi kembali metodologi penilaian diri (Hargittai & Shafer, 2006; Palczyńska & Rynko, 2020; van Deursen, van Dijk, & Peters, 2011).

Rekomendasi

Ditjen Aptika seyogianya menerapkan penilaian berbasis kinerja untuk memvalidasi keterampilan literasi digital yang dilaporkan secara mandiri (OECD, 2013; UNESCO, 2019).¹³ Ditjen Aptika dapat mempertimbangkan Penilaian Literasi TIK iSkills (iSkills Assessment for ICT Literacy) dari Educational Testing Service (ETS), sebuah penilaian berbasis skenario dan kinerja yang mengevaluasi keterampilan literasi TIK siswa dengan meminta siswa melakukan berbagai simulasi literasi TIK, seperti skenario menggunakan surel atau peramban web (Katz, 2007). Penilaian berbasis skenario ini sangat relevan dengan indeks literasi digital karena banyak skenario dalam penilaian ini sesuai dengan tugas-tugas yang tertera pada bagian keterampilan digital dalam indeks.

Misalnya, indeks menanyakan kepada responden apakah mereka bisa mengunduh dan mengunggah fail/aplikasi serta membandingkan sumber informasi untuk menentukan kebenarannya. Hal-hal ini tercakup dalam tugas-tugas pada Penilaian iSkills dari ETS. Dibandingkan dengan penilaian diri, format ini lebih efektif dalam mengukur digital skills atau keterampilan digital, khususnya *hard skills*, karena ia secara langsung mengukur pengetahuan (aplikasi teoretis keterampilan digital) dan kemampuan teknis responden dalam mengoperasikan perangkat keras dan lunak digital (contoh: menggunakan komputer, memakai peramban web, dsb.) dalam konteks penyelesaian masalah (Hargittai, 2005; Helsper & Van Deursen, 2015; Muszyński *et al.*, 2022; Senkbeil *et al.*, 2013; van Laar *et al.*, 2020). Selain itu, tugas kinerja berbasis skenario lebih hemat biaya dan praktis untuk diterapkan karena dapat dilaksanakan secara daring oleh sampel yang lebih besar daripada uji kompetensi TIK lainnya yang membutuhkan pesertanya datang secara langsung (van Laar *et al.*, 2020).

Ditjen Aptika juga perlu menyediakan opsi berbasis kertas untuk mengatasi masalah-masalah terkait keterbatasan penggunaan atau akses perangkat keras dan penilaian berbasis internet. Rendahnya tingkat akses internet dan ponsel di wilayah-wilayah 3T Indonesia telah menghalangi penerapan program-program literasi digital berbasis internet dan perangkat lunak (Pusat Kajian Akuntabilitas Negara DPR, 2022). Ditjen Aptika sebaiknya merujuk kepada Uji Literasi Teknologi dan Informasi (Test of Technological and Information Literacy atau TILT), penilaian berbasis kertas yang diakui oleh UNESCO yang menggunakan pertanyaan pilihan ganda untuk mengukur tujuh komponen literasi TIK sebagaimana dinilai dalam uji iSkills ETS (2007) (Senkbeil *et al.*, 2013; UNESCO, 2019).¹⁴ Ditjen Aptika juga perlu merujuk kepada Survei Keterampilan Penduduk Dewasa PIAAC (PIAAC Survey of Adult Skills) dari OECD pada 2016 sebagai studi kasus yang berhasil melaksanakan penilaian kinerja berbasis komputer versi kertas di Indonesia (OECD, 2016).¹⁵

¹³ CSIS juga merekomendasikan penggunaan survei berbasis tes untuk melengkapi analisis toolkit G20 (CSIS Indonesia, 2022).

¹⁴ iSkills ETS mengidentifikasi dan mengukur tujuh komponen proses literasi TIK: (i) mendefinisikan, yang mencakup pengetahuan dasar pengoperasian perangkat keras dan lunak; (ii) kemampuan mengakses dan menerima informasi dari peramban internet; (iii) mengelola dan memproses informasi; (iv) membuat dan menyunting dokumen/fail; (v) mengintegrasikan, atau kemampuan menerima dan membandingkan informasi; (vi) mengevaluasi atau menilai kredibilitas informasi yang diterima; dan (vii) kemampuan mengomunikasikan informasi secara bermakna (dengan pantas dan dalam bentuk yang dapat dipahami).

¹⁵ OECD menyediakan opsi berbasis kertas untuk komponen penilaian berbasis komputer pada aspek literasi dan numerasi. OECD tidak menyediakan opsi berbasis kertas untuk penilaian keterampilan operasional.

Kemampuan untuk mengenali “berita palsu” (hoaks) juga dapat diukur dengan lebih baik melalui penilaian berbasis observasi dan kinerja daripada penilaian diri oleh responden.¹⁶ Banyak responden menilai secara berlebihan kemampuan mereka mengenali berita palsu dalam penilaian mandiri dan ternyata mendapatkan skor buruk ketika diukur menggunakan penilaian berbasis kinerja, sebagaimana terbukti pada penelitian yang dilakukan di Amerika Utara dan Asia Tenggara (Lyons *et al.*, 2020; TrustedWeb, 2021¹⁷). Penilaian berbasis observasi dan kinerja sepatutnya digunakan untuk mengukur kompetensi dan literasi media untuk melengkapi penilaian diri (Bühler *et al.*, 2020).

Ditjen Aptika sebaiknya menerapkan uji kemampuan membedakan (*discernment ability test*) sebagai penilaian berbasis kinerja untuk mengukur kemampuan mengenali hoaks/berita palsu (Lyons *et al.*, 2020).¹⁸ Dalam penilaian berbasis kinerja ini, Ditjen Aptika harus menunjukkan judul berita yang benar dan palsu secara acak. Penilaian indeks yang digunakan saat ini meminta responden untuk mengevaluasi isu-isu berita suatu topik untuk membedakan berita palsu hanya dengan menyajikan judul berita palsu kepada responden. Ini dapat mengakibatkan responden melakukan tebakan hipotesis (*hypothesis guessing*), yakni ketika mereka berasumsi bahwa semua judul adalah palsu hanya karena mereka ditanya mengenai berita palsu (Choi & Pak, 2005).¹⁹ Dengan memasukkan judul berita yang benar maupun palsu secara acak, Ditjen Aptika meningkatkan reliabilitas butir pertanyaan dan mengurangi kemungkinan bias respons karena responden menebak (Goodhue & Loiacono, 2002).

Penilaian berbasis kinerja adalah alat ukur *hard skills*, seperti keterampilan digital dan kemampuan mengenali hoaks, yang lebih efektif. Teknik ini membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki satu tanggapan atau solusi yang benar, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terlalu berkaitan dengan evaluasi keterampilan lunak yang membutuhkan kreativitas serta kemampuan berpikir kritis (van Laar *et al.*, 2020). Ini membuat penilaian berbasis kinerja kurang cocok untuk mengevaluasi digital culture dan digital ethics. Maka dari itu, Ditjen Aptika seyogianya mempertahankan penilaian diri (*self-assessment*) jika ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi bias respons yang disebutkan di atas.

Ditjen Aptika perlu menggunakan teknik klaim berlebihan (*overclaiming technique*) untuk mengatasi isu estimasi berlebihan dalam penilaian keterampilan secara mandiri. Teknik ini menyebarkan lima pertanyaan pengecoh²⁰ yang meminta responden untuk mengevaluasi kompetensi mereka dalam suatu keterampilan yang sebenarnya tidak ada di dalam proses penilaian diri. Teknik klaim berlebihan ini digunakan oleh The Digital Framework for Citizens (DigComp 2.1) dari European Commission yang menunjukkan bahwa reliabilitas hasil penilaian meningkat secara signifikan ketika skor klaim berlebihan yang tinggi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan (Muszyński *et al.*, 2022).²¹ Teknik klaim berlebihan praktis dan hemat biaya karena dapat diterapkan secara bersamaan dengan pengumpulan dan pengolahan data indeks. Metode yang relatif tidak mencolok ini juga menghindari kemungkinan responden tidak kooperatif karena tidak perlu memberi tahu responden tentang pertanyaan pengecoh dan tidak ada tekanan waktu (Paulhus *et al.*, 2003).

¹⁶ Indeks literasi digital mengukur kemampuan untuk mengenali hoaks dengan memberikan pertanyaan penilaian pribadi seperti “Seberapa yakin Anda dengan kemampuan Anda mengidentifikasi/mengenali misinformasi/berita salah/hoaks?” dengan pilihan jawaban “Sangat yakin”, “yakin”, “Netral”, dan “Tidak yakin”.

¹⁷ Survei menunjukkan bahwa 90% responden sangat yakin bahwa mereka dapat mengidentifikasi berita palsu. Namun, 37% responden masih menyebarkan konten daring palsu atau menyesatkan secara tidak sengaja (TrustedWeb, 2021).

¹⁸ Penilaian ini menyajikan 12 judul berita (kombinasi judul berita benar dan salah) kepada responden dan menanyakan mereka untuk mengevaluasi keakuratan setiap judul berita menggunakan skala empat poin (“Sangat tidak akurat” hingga “Sangat akurat”). Selisih skor antara jumlah judul berita yang benar dan salah yang diidentifikasi dengan benar kemudian dihitung dan dibandingkan dengan kemampuan yang dinilai sendiri oleh responden untuk mengenali berita salah (Lyons *et al.*, 2020).

¹⁹ Tebakan hipotesis adalah bias yang lazim ditemukan dalam kuesioner. Responden dapat secara sistematis mengubah tanggapan surveinya ketika mereka menyadari hipotesis studi ketika proses mengisi (Choi & Pak, 2005).

²⁰ Pertanyaan pengecoh secara sengaja dibuat salah dan merujuk kepada alat atau layanan yang sebenarnya tidak ada. Maka dari itu, jika responden menyatakan mereka mengerti istilah-istilah buatan tersebut, hal tersebut berarti bahwa mereka memiliki keyakinan yang berlebihan atau bias sehingga mereka dikecualikan dari penilaian mandiri.

²¹ Serupa dengan indeks literasi digital Kemendikbud, DigComp 2.1 bertujuan mengukur kompetensi dan literasi digital dalam domain-domain seperti keamanan, komunikasi dan kolaborasi (netiket, digital ethics, digital culture), dan literasi informasi dan data (keterampilan digital) melalui sejumlah pertanyaan penilaian mandiri yang mengukur pengetahuan (misalnya, “Saya mengerti ini”), keterampilan (“Saya dapat melakukan ini”), dan sikap (“Ya/tidak terlalu/tidak sama sekali”) responden terkait literasi digital.

Memperbaiki Indeks: Membedakan Analisis Hasil Survei untuk Memastikan Keterwakilan Kelompok Masyarakat Rentan

Identifikasi Masalah

Praktik-praktik terbaik dari sejumlah uji literasi terkemuka, termasuk Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), sangat merekomendasikan pengambilan sampel yang ketat demi menghasilkan perkiraan keterampilan yang akurat dengan memastikan bahwa kelompok sampel mewakili target populasi (Chetty *et al.*, 2018; Joncas & Foy, 2012).

Pengukuran-pengukuran literasi digital sebelumnya telah berupaya mengambil sampel secara ketat dengan memastikan bahwa sampelnya meliputi semua rentang usia (Ali *et al.*, 2023; Hargittai *et al.*, 2018), tetapi sebagian besar studi ini dilakukan di negara-negara maju (terutama Eropa), dan di negara-negara ini, usia menjadi prediktor utama literasi digital (Ali *et al.*, 2023; Hargittai *et al.*, 2018). Negara-negara berkembang memiliki karakteristik demografis terkait literasi digital yang lebih luas (misalnya, pendidikan, gender, dan tingkat pendapatan) karena mereka memiliki hambatan akses internet dan pelatihan yang berbeda-beda (Thies, 2015; Vashistha *et al.* 2019, Qazi *et al.* 2021 sebagaimana dikutip dalam Ali *et al.*, 2023). Maka dari itu, penilaian literasi digital yang akurat di negara-negara berkembang membutuhkan kelompok sampel yang menangkap lebih dari sekadar kelompok usia.

Indeks literasi digital kurang mewakili berbagai segmen demografis dalam analisisnya, khususnya anak-anak usia sekolah dan responden di daerah perdesaan. Hal ini menyebabkan indeks kurang dapat menghasilkan estimasi keterampilan yang akurat pada seluruh karakteristik demografis yang memengaruhi literasi digital serta menghalangi Ditjen Aptika dalam mengembangkan pelatihan literasi digital yang tertarget dan sesuai.

Rekomendasi

Untuk memastikan bahwa indeks literasi digital memberikan gambaran umum literasi digital yang menyeluruh, Ditjen Aptika perlu mengembangkan unit perdesaan sebagai segmen demografis spesifik dalam indeks, seperti halnya sektor-sektor seperti pendidikan dan pemerintah dibedakan (Kemenkominfo & Katadata, 2023).²² Analisis ini akan didukung lebih lanjut jika kriteria mengakses internet dalam tiga bulan terakhir tidak diberlakukan untuk partisipan dari daerah perdesaan—dengan pemahaman bahwa kriteria ini mengecualikan banyak masyarakat daerah perdesaan dan terpencil di Indonesia—untuk menghasilkan penilaian literasi digital yang akurat.

Bagian analisis literasi digital dalam indeks di sektor pendidikan juga harus membedakan antara siswa dan guru serta memisahkan anak-anak dari orang dewasa untuk memastikan bahwa kelebihan dan tantangan masing-masing kelompok terwakili dengan baik dalam indeks. Siswa juga harus diberi kuesioner penilaian diri dan uji berbasis kinerja untuk menilai kompetensi digital mereka. Langkah-langkah ini tidak hanya akan menutup kesenjangan data, tetapi juga memberikan wawasan yang berarti terkait faktor-faktor yang berkontribusi terhadap disparitas literasi digital pada kelompok-kelompok yang kurang terwakili ini. Ini akan membantu pemerintah menyesuaikan dan mengembangkan program-program literasi digital supaya lebih tertarget dan efektif bagi berbagai segmen masyarakat.

²² Bagian 4.4 dari Laporan Indeks Literasi Digital 2023 melihat status literasi digital berbagai segmen masyarakat yang dikategorisasikan berdasarkan pekerjaan.

Ringkasan Rekomendasi Kebijakan

- **Perbaiki hasil analisis survei untuk membedakan berbagai segmen masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan lebih banyak dukungan literasi digital**

Ditjen Aptika perlu membuat bagian analisis tersendiri untuk kelompok masyarakat perdesaan, guru, mahasiswa, dan anak-anak usia sekolah untuk memahami kebutuhan dan tantangan spesifik mereka yang berhubungan dengan literasi digital.

Ditjen Aptika perlu mengacu kepada bagian analisis yang sudah ada tentang wilayah 3T dan analisis berbasis pekerjaan untuk susunan analisis tersendiri ini.

Analisis untuk kelompok-kelompok ini seyogianya menggunakan penilaian diri maupun penilaian berbasis kinerja.

Wawasan dari analisis yang lebih spesifik ini dapat digunakan oleh Kemenkominfo dan Kemendes PDTT untuk mengembangkan dukungan literasi digital yang sesuai untuk kelompok-kelompok masyarakat rentan tersebut. Hal tersebut dapat meliputi dukungan adopsi teknologi oleh pemerintah desa setempat dan adopsi teknologi di sekolah untuk mendukung siswa dan guru.

- **Pastikan bahwa metode penilaian dapat mengukur kompetensi digital secara akurat**

Ditjen Aptika harus mengintegrasikan penilaian berbasis kinerja ke dalam proses evaluasi mereka guna mengukur *hard skills*, seperti keterampilan digital dan kemampuan mengenali berita palsu, secara akurat.

Untuk mengevaluasi kemampuan mengenali berita palsu, uji berbasis kinerja harus berisi pertanyaan-pertanyaan acak untuk mencegah responden menjawab dengan cara menebak.

Ditjen Aptika perlu melakukan penilaian-penilaian ini melalui uji berbasis perangkat lunak, dengan opsi uji berbasis kertas untuk mengakomodasi daerah-daerah di Indonesia yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital dan konektivitas internet.

Untuk keterampilan lunak, seperti digital ethics dan digital culture, Ditjen Aptika harus meningkatkan reliabilitas metodologi penilaian mandiri melalui teknik kualitas data, seperti teknik klaim berlebihan (*overclaiming technique*), untuk mengantisipasi kecenderungan responden yang menilai keterampilan dirinya secara berlebihan.

- **Integrasikan temuan-temuan indeks ke dalam rancangan program literasi digital**

Ditjen Aptika harus memanfaatkan wawasan yang diperoleh dari penilaian yang telah diperbaiki sebagai dasar rancangan program-program pelatihan literasi digitalnya, yaitu dengan menyesuikannya dengan berbagai tantangan, keterampilan, dan kapasitas masing-masing target demografi. Program-program ini perlu dirancang dengan format dan muatan yang memenuhi kebutuhan setiap kelompok.

Ditjen Aptika perlu menjalin kemitraan kolaboratif untuk menyediakan program-program pelatihan literasi digital yang tertarget dan efektif untuk membekali individu dan masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di zaman digital ini.

Data indeks dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi digital, dan progresnya dapat dijadikan dasar penetapan alokasi anggaran.

Referensi

- Aesaert, K., Voogt, J., Kuiper, E., & van Braak, J. (2017). Accuracy and bias of ICT self-efficacy: An empirical study into students' over- and underestimation of their ICT competences. *Computers in Human Behavior*, 75(1), 92-102. Diambil dari: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563217303229>
- Ali, A., Raza, A.A., & Qazi, I.A. (2023). Validated digital literacy measures for populations with low levels of internet experiences. *Development Engineering*, 8. Diambil dari: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352728523000015?via%3Dihub>
- Bühler, J., Murawski, M., Darvish, M., & Bick, M. (2020). Developing a Model to Measure Fake News Detection Literacy of Social Media Users. In K Shu, S Wang, D Lee, H Liu (Ed.) *Disinformation, Misinformation, and Fake News in Social Media* (pp.213-227). Diambil dari: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-42699-6_11
- Cao, L., Niu, H., & Wang, YF. (2022). Utility analysis of digital villages to empower balanced urban-rural development based on the three-stage DEA-Malmquist model. *PLoS ONE*, 17(8). Diambil dari: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35913937/>
- Center for Financial Accountability of the House of Representatives. (2022). *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Literasi Digital* (Rep.). Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI. Diambil dari: <https://berkas.dpr.go.id/puskajiakn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-62.pdf>
- Chetty, K., Qigui, L., Gcora, N., Josie, J., Wenwei, L., & Fang, C. (2018). Bridging the digital divide: measuring digital literacy. *Economics*, 12(1). Diambil dari: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.5018/economics-ejournal.ja.2018-23/html>
- Choi, B.C.K., & Pak, A.W.P. (2005). A Catalog of Biases in Questionnaires. *Preventing Chronic Disease*, 2(1). Diambil dari: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1323316/>
- CSIS Indonesia. (2022). *Digital Literacy and Skills Toolkit Implementation in Indonesia: Experience and Lessons Learned from Small Survey* (Rep.). Diambil dari: https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Digital_literacy_and_skills_toolkit_implementation_in_Indonesia.pdf?download=1
- DGIA. (2021). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2020-2024 (Rep.). Retrieved from: <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2022/09/RENSTRA-APTIKA-2020-2024-30-DES-2021-3.pdf>
- DGIA. (2022, September). Kominfo Gandeng Pandu Digital JSDI Ajarkan Empat Pilar Literasi Digital. Diambil dari: <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/kominfo-gandeng-pandu-digital-jsdi-ajarkan-empat-pilar-literasi-digital/>
- DGIA. (2023, February). *Indeks Literasi Digital Indonesia Kembali Meningkatkan Tahun 2022*. Diambil dari: <https://aptika.kominfo.go.id/2023/02/indeks-literasi-digital-indonesia-kembali-meningkat-tahun-2022/>
- Goodhue, D.L., & Loaicono, E.T. (2022). Randomizing survey question order vs. grouping questions by construct: an empirical test of the impact on apparent reliabilities and links to related constructs. *Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, Hawaii, USA: IEEE. Diambil dari: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/994385>
- Hargittai, E. (2005). Survey Measures of Web-Oriented Digital Literacy. *Social Science Computer Review*, 23(3), 371-379. Diambil dari: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894439305275911>
- Hargittai, E., & Shafer, S. (2006). Differences in Actual and Perceived Online Skills: *The Role of Gender*. *Social Science Quarterly*, 87(2), 432-448. Diambil dari: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6237.2006.00389.x>
- Hargittai, E., Piper, A.M., & Morris, M.R. (2018). From internet access to internet skills: digital inequality among older adults. *Universal Access in the Information Society*, 18, 881-890. Retrieved from: https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/hargittai2019_article_frominternetaccesstointernetsk.pdf
- Helsper, E.J., & van Deursen, A.J.A.M. (2015). Digital Skills in Europe: Research and Policy. In K Andreasson (Ed.), *Digital Divides: The New Challenges and Opportunities of e-Inclusion*. Diambil dari: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/b17986-12/digital-skills-europe-research-policy-ellen-johanna-helsper-alexander-van-deursen>
- Helsper, E.J., Schneider, L.S., van Deursen, A.J.A.M., & van Laar, E. (2020). *The Youth Digital Skills Indicator: Report on the conceptualisation and development of the ySKILLS digital skills measure* (Rep.). KU Leuven, Leuven: ySKILLS. Diambil dari: https://eprints.lse.ac.uk/108878/1/Helsper_the_youth_digital_skills_indicator_published.pdf
- Herde, C.N., Lievens, F., Solberg, E.G., Harbaugh, J.L., Strong, M.H., & Burkholder, G.J. (2019). Situational judgment tests as measures of 21st century skills: Evidence across Europe and Latin America. *Journal of Work and Organizational Psychology*, 35(2), 65-74. Diambil dari: <https://psycnet.apa.org/record/2019-44717-003>

- Indrani Medhi Thies. (2015). User Interface Design for Low-literate and Novice Users: Past, Present and Future”, *Foundations and Trends®. Human-Computer Interaction*: Vol. 8: No. 1, pp 1-72. <http://dx.doi.org/10.1561/1100000047>
- Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2023). The Digital Gap and Solutions Implemented in Indonesia during the COVID-19 Pandemic (Rep.). Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, 24(2). Diambil dari: <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom/article/view/4859/1896>
- Joncas, M., & Foy, P. (2012). Sample Design in TIMSS and PIRLS. In *Methods and Procedures: Sampling Implementation*. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. Diambil dari: https://timssandpirls.bc.edu/methods/pdf/tp_sampling_design.pdf
- Katadata Insight Center & MOCI. (2023). Peluncuran Status Literasi Digital Indonesia 2022 [Video file]. Diambil dari: <https://www.youtube.com/watch?v=UbSqPkHko6U>
- Katz, I.R. (2007). Testing Information Literacy in Digital Environments: ETS’s iSkills Assessment. *Information Technology and Libraries*, 26(3), 3–12. Diambil dari: <https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/3271>
- Lyons, B.A., Montgomery, J.M., Guess, A.M., & Reifler, J. (2021). Overconfidence in news judgments is associated with false news susceptibility. *PNAS*, 118(23). Retrieved from: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2019527118>
- MOCI & Katadata Insight Center. (2020). *Status Literasi Digital Indonesia 2020: Hasil Survei di 34 Provinsi (Rep.)*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika & Katadata Insight Center. Diambil dari: https://cdn1.katadata.co.id/media/microsites/litdik/Status_Literasi_Digital_Nasional_2020.pdf
- MOCI & Katadata Insight Center. (2022). *Status Literasi Digital di Indonesia 2021(Rep.)*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika & Katadata Insight Center. Diambil dari: <https://databoks.katadata.co.id/publikasi/2022/01/01/status-literasi-digital-indonesia-2021>
- MOCI & Katadata Insight Center. (2023). *Status Literasi Digital di Indonesia 2022(Rep.)*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika & Katadata Insight Center. Diambil dari: https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2023/02/Report_Nasional_2022_FA_3101.pdf
- MOCI. (2017, December). *Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia*. Diambil dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media
- MOCI. (2019, February). *Apa itu Industri 4.0 dan bagaimana Indonesia menyongsongnya*. Diambil dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media
- MOCI. (2020, September). *Sekjen Kominfo: Kolaborasi dorong perkembangan talenta digital*. Diambil dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/29630/sekjen-kominfo-kolaborasi-dorong-perkembangan-talenta-digital/0/sorotan_media
- MOCI. (2021a, February). *Literasi Digital Jadi Kunci Keberhasilan Transformasi Digital*. Diambil dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/32823/literasi-digital-jadi-kunci-keberhasilan-transformasi-digital/0/berita_satker
- MOCI. (2021b, February). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024*. Diambil dari: https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/764/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+2+tahun+2021
- MOCI. (2022, November). *Tegaskan Tiga Fokus Transformasi Digital, Presiden: DEWG Sudah Bergerak*. Diambil dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/45776/siaran-pers-no-511hmkominfo112022-tentang-tegaskan-fokus-transformasi-digital-presiden-dewg-sudah-bergerak/0/siaran_pers
- MOCI. (2023, February). *Perkuat Literasi Digital, Kominfo Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi*. Diambil dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/47533/siaran-pers-no-20hmkominfo022023-tentang-perkuat-literasi-digital-kominfo-kolaborasi-dengan-perguruan-tinggi/0/siaran_pers
- MOCI. (n.d.) *Digitalent Frequently Asked Questions*. Diambil dari: <https://digitalent.kominfo.go.id/faq/11>
- MOVDRT. (2021, November). *Gus Halim: Digitalisasi Desa Harus Diimbangi Literasi Digital*. Diambil dari: <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/4065/gus-halim-digitalisasi-des-a-harus-diimbangi-literasi-digital>
- Muszyński, M., Pokropek, A., Castaño-Muñoz, J., & Vuorikari, R. (2022). Can Overclaiming Technique Improve Self-Assessment Tools for Digital Competence? The Case of DigCompSat. *Social Science Computer Review*, 0(0). Diambil dari: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08944393221117269>

- Nababan, F.E., & Imron, D.K. (2022). Digital Economy and Local Policy: Strategy for Village Development During COVID-19 Pandemic. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(2). Diambil dari: <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/39779>
- Negara, S.D., & Meliasari-Sugiana, A. (2022). The State of Indonesia's Digital Economy in 2022. *Perspective*, 109. Diambil dari: https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/09/ISEAS_Perspective_2022_109.pdf
- OECD. (2013). *Skilled for Life? Key Findings from the Survey of Adult Skills* (Rep.). OECD. Diambil dari: http://www.oecd.org/site/piaac/SkillsOutlook_2013_ebook.pdf
- OECD. (2016). *OECD Skills Studies: The Survey of Adult Skills, Reader's Companion, Second Edition* (Rep.). OECD. Diambil dari: https://read.oecd-ilibrary.org/education/the-survey-of-adult-skills_9789264258075-en#page1
- Onitsuka, K., Hidayat, AR.R.T., & Huang, W. (2018). Challenges for the next level of digital divide in rural Indonesian communities. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 84(2). Diambil dari: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/isd2.12021>
- Palczyńska, M., & Rynko, M. (2020). ICT skills measurement in social surveys: Can we trust self-reports?. *Quality & Quantity*, 55(1), 917-943. Diambil dari: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11135-020-01031-4>
- Paulhus, D. L., Harms, P. D., Bruce, M. N., & Lysy, D. C. (2003). The over-claiming technique: Measuring self-enhancement independent of ability. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(4), 890-904. Diambil dari: <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.84.4.890>
- Robins, R.W., & Beer, J.S. (2001). Positive illusions about the self: Short-term benefits and long-term costs. *Journal of Personality and Social Psychology*, 80(2), 340-352. Diambil dari: <https://psycnet.apa.org/record/2001-16163-012>
- Rosyidah, U.A., & Warisaji, T.T. (2022). Pendampingan Digital Safety Sebagai Precaution Penipuan Digital Di Desa Sidomukti Mayang. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember*, 1(2). Diambil dari: <http://ejournal.unmuhjember.ac.id/index.php/ABDIMASTEK/article/view/206>
- Sapulette, M.S., & Muchtar, P.A. (2023). *Redefining Indonesia's Digital Economy* (Rep.). Jakarta, Indonesia: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Diambil dari: <https://www.eria.org/uploads/media/policy-brief/FY2022/Redefining-Indonesia%E2%80%99s-Digital-Economy.pdf>
- Senkbeil, M., Ihme, J.M. & Wittwer, J. (2013). The Test of Technological and Information Literacy (TILT) in the National Educational Panel Study: Development, empirical testing, and evidence for validity. *Journal for Educational Research Online*, 5(2), 139-161. Diambil dari: https://pure.ipn.uni-kiel.de/portal/files/476442/364_1419_3_PB.pdf
- SMERU Research Institute. (2022). *Diagnostic Report: Digital Skills Landscape in Indonesia*. Diambil dari: <https://smeru.or.id/en/file/4519download?token%3D0HU6OfQK&sa=D&source=docs&ust=1691039739117660&usg=AOvVaw3jpiVvsgzaRigrZ8dVa6d1>
- Soon, C., Krishnan, N.B., & Goh, S. (2022, June). Targeted approach needed to boost digital literacy. *The Strait Times*. Diambil dari: <https://nus.edu.sg/newshub/news/2022/2022-06/2022-06-22/LITERACY-st-22jun-pA16.pdf>
- Statistics Indonesia. (2022). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2022* (Rep.). Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diambil dari: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1
- The Economist. (2022). *Inclusive Internet Index, Readiness - Southeast Asia - Pacific*. Economist Impact. Diambil dari: <https://impact.economist.com/projects/inclusive-internet-index/2022/readiness?country=Indonesia>
- Thies, I.M. (2015). User Interface Design for Low-literate and Novice Users: Past, Present and Future. *Human-Computer Interaction*, 8(1), 1-72. Diambil dari: <https://www.nowpublishers.com/article/Details/HCI-047>
- Tinmaz, H., Lee, Y.T., Fanea-Ivanovici, M., & Baber, H. (2022). A systematic review on digital literacy. *Smart Learning Environments*, 9(21), 1-18. Diambil dari: <https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-022-00204-y#citeas>
- TrustedWeb. (2021). *State of Misinformation 2021: Southeast Asia edition* (Rep.). TrustedWeb. Diambil dari: https://thetrustedweb.org/wp-content/uploads/2021/08/Trusted-Web-Report-State-of-Misinformation-SE_Asia.pdf
- UNESCO. (2019). *Recommendations on Assessment Tools for Monitoring Digital Literacy within UNESCO's Digital Literacy Global Framework* (Rep.). Montreal: UNESCO Institute for Statistics. Diambil dari: <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip56-recommendations-assessment-tools-digital-literacy-2019-en.pdf>

UNICEF. (2021). *Situational Analysis on Digital Learning Landscape In Indonesia* (Rep.). UNICEF. Diambil dari: <https://www.unicef.org/indonesia/media/8766/file/Digital>

Van Deursen, A.J.A.M., van Dijk, J.A.G.M., & Peters, O. (2011). Rethinking Internet skills: The contribution of gender, age, education, Internet experience, and hours online to medium- and content-related Internet skills. *Poetics*, 39(2), 125-144. Diambil dari: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304422X11000106>

van Deursen, A.J.A.M., van Dijk, J.A.G.M., & Peters, O. (2012). Proposing a Survey Instrument for Measuring Operational, Formal, Information, and Strategic Internet Skills. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 28(12). Diambil dari: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10447318.2012.670086?journalCode=hihc20>

van Laar, E., van Deursen, A.J.A.M., van Dijk, J.A.G.M., & de Haan, J. (2020). Measuring the levels of 21st-century digital skills among professionals working within the creative industries: A performance-based approach. *Poetics*, 81. Diambil dari: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304422X19300956>

Vashistha, A., Saif, U., Raza, A.A. (2019). The internet of the orals. *Communications of the ACM*, 62(11),100-103. Diambil dari: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3343452>

Wendratama, E., Kurnia, N., & Monggilo, Z.M.Z. (2021, September). Hari Literasi 2021: pemerintah dan masyarakat perlu kembangkan terus pendekatan yang beragam. *The Conversation*. Diambil dari: <https://theconversation.com/hari-literasi-2021-pemerintah-dan-masyarakat-perlu-kembangkan-terus-pendekatan-yang-beragam-167345>

World Bank. (2021). *Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia* (Rep.). Washington D.C.: The World Bank. Retrieved from: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/beyond-unicorns-harnessing-digital-technologies-for-inclusion-in-indonesia>

World Bank. (2022). *Rural population (% of total population)*. The World Bank, Databank. Diambil dari: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS> pada 15 Februari, 2023

Zulvia, P., & Harahap, A.S. (2023). Advokasi Digitalisasi Desa dalam Pengembangan Potensi Desa Lembang sebagai Desa Digital. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). Diambil dari: <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/view/2501>

Wawancara

Wawancara 1: Koordinator Program Literasi Digital Nasional Kemenkominfo (2023). Komunikasi pribadi.

Lampiran A.
Perubahan dan Kontinuitas Indeks Literasi Digital 2020, 2021, dan 2022

Kriteria	Indeks Literasi Digital 2020	Indeks Literasi Digital 2021	Indeks Literasi Digital 2022
Tujuan penelitian	Menilai kondisi literasi digital nasional seluruh masyarakat Indonesia		
	Mengembangkan kerangka kerja untuk mengukur literasi digital di 34 provinsi di Indonesia	Menyesuaikan kerangka kerja indeks untuk mengukur literasi digital dengan Peta Jalan Literasi Digital Ditjen Aptika 2020–2024 Mendalami perilaku dan kebiasaan masyarakat Indonesia terkait teknologi dan media digital	Menilai kesiapan Indonesia untuk menerapkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi Menilai kelayakan infrastruktur digital untuk kompetensi digital di Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Mengevaluasi status literasi digital daerah 3T Mendokumentasikan dampak-dampak literasi digital terhadap produktivitas kerja dan belajar masyarakat Indonesia
Target demografi	Semua warga negara Indonesia berusia 13–70 tahun yang telah mengakses internet. Sampel survei mencakup 34 provinsi.	Semua warga negara Indonesia berusia 13–70 tahun yang telah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir . Sampel survei mencakup 34 provinsi.	
Metode pengumpulan data	Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung. Responden dipilih melalui pemilihan sampel acak multistage dari tingkat provinsi hingga rumah tangga. Responden dari setiap unit rumah tangga dipilih menggunakan metode <i>kish grid</i> .		
Kerangka penelitian	“A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills” (UNESCO, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills (UNESCO, 2018) 2. Peta Jalan Literasi Digital Ditjen Aptika 2020–2024 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills (UNESCO, 2018) 2. Peta Jalan Literasi Digital Ditjen Aptika 2020–2024 3. G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy: Framework and Approach (CSIS, 2022)

<p>Indikator-indikator literasi digital</p>	<p>Mengukur empat subindeks:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan literasi data <ul style="list-style-type: none"> • Informasi dan literasi data • Berpikir kritis 2. Komunikasi dan kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan berkomunikasi • Etika dalam teknologi 3. Keamanan <ul style="list-style-type: none"> • Keamanan data pribadi dan privasi • Keamanan perangkat 4. Kemampuan teknologi <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan teknologi digital 	<p>Mengukur empat pilar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Digital Skill</i> (sebelumnya subindeks informasi dan literasi data dan subindeks kemampuan teknologi) 2. <i>Digital Culture</i> (sebelumnya kemampuan berkomunikasi) 3. <i>Digital Ethics</i> (sebelumnya etika dalam teknologi) 4. <i>Digital Safety</i> (sebelumnya subindeks keamanan) 	<p>Mengukur empat pilar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digital Skill <ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan pilar <i>Empowerment</i> (Pemberdayaan) dari <i>toolkit</i> G20 dengan kemampuan menggunakan alat keuangan digital dan lokapasar (<i>marketplace</i>); • Mengintegrasikan pilar <i>Literacy</i> (Literasi) dari <i>toolkit</i> G20 dengan komunikasi dan berpikir kritis 2. Digital Culture <ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan pilar <i>Literacy</i> (Literasi) dari <i>toolkit</i> G20 dengan penggunaan data dan alat TIK 3. Digital Ethics 4. Digital Safety <ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan pilar <i>Literacy</i> (Literasi) dari <i>toolkit</i> G20 dengan perilaku dan kebiasaan responden terkait alat digital dan keamanan (perlindungan data pribadi).
<p>Metodologi penilaian</p>	<p>Penilaian diri dalam format kuesioner. Responden harus menilai kompetensi digital mereka sendiri dan memberi nilai pada skala Likert (1 hingga 5).</p> <p>Responden juga harus menyelesaikan serangkaian butir pertanyaan untuk menilai tingkat paparan mereka terhadap hoaks, kemampuan mengenali hoaks, dan bagaimana mereka mengonsumsi berita daring.</p>		

TENTANG PENULIS

Natasya Zahra memegang gelar Bachelor of Arts dari Universitas Sydney di mana ia juga mengambil jurusan dalam Pemerintahan - Hubungan Internasional dan Studi Asia. Sebelum bergabung dengan CIPS, dia adalah perwakilan mahasiswa yang mengadvokasi fasilitas publik yang ramah disabilitas dan dia adalah anggota aktif dari asosiasi mahasiswa universitasnya. Di CIPS ia pertama kali menyelesaikan Emerging Policy Leaders Program pada tahun 2022 sebelum bergabung sebagai peneliti muda.

Kerja kami bergantung pada dukungan Anda.
Kunjungi www.cips-indonesia.org/donate untuk mendukung CIPS.



Lihat ringkasan kebijakan lain yang diterbitkan Center for Indonesian Policy Studies



Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19



Memajukan Keterampilan Literasi Digital Siswa melalui Pemutakhiran Kurikulum Sekolah



Persepsi Orang Tua terhadap Pembelajaran Tatap Muka



Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Pasca Covid-19 Melalui Penyederhanaan Kerangka Kerja Peraturan Indonesia



Primum Non Nocere: Sebuah Pendekatan Kebijakan untuk Investasi Farmasi di Indonesia



Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal



Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia



Siapa yang Bertanggung Jawab atas Konten Buatan Pengguna (UGC) pada Platform Digital di Indonesia?



Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia

Silahkan kunjungi situs kami untuk membaca publikasi lainnya:

cips-indonesia.org/publications

